Journal Education and Government Wiyata ISSN 2986-5131
Volume 4 Nomor 3, Agustus 2026 (760-773)
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov

DEKONSTRUKSI TATA KELOLA PEMBIAYAAN PESANTREN: HARMONISASI DATA AKREDITASI DAN ALOKASI APBA YANG BERKEADILAN DI ACEH

Amir Hasan[1]
Bappeda Aceh, Indonesia[1]
E-mail: amirhasanseak@gmail.com[1]

ABSTRACT

Efforts to achieve economic self-reliance for Islamic boarding schools (dayah) in Aceh have stalled, as evidenced by the institutions' productivity remaining at 5.85% well below the 9.4% target set for 2025. This study investigates the structural dissonance between technocratic planning and the execution of regional budgeting. Through a qualitative approach using a case study design, USG analysis, Fishbone diagrams, and a TOWS matrix, it was found that the root of the problem stems from distortions in the allocation of the Aceh Revenue and Expenditure Budget (APBA) resulting from pork barrel politics. These political interventions disregard the database of 1,827 accredited dayahs, thereby creating distributive injustice that marginalizes traditional dayahs in disaster-prone areas. Downstream, the dayahs' inertia in digitizing reporting through the Education Management Information System (EMIS) further hinders access to external funding. A policy evaluation using the William Dunn method recommends institutionalizing the "Dayah Needs Index" as an instrument of the Mandatory Budgeting Policy within the Local Government Information System (SIPD). This technocratic framework is designed to ensure proportional budget allocation based on accreditation quality data, the number of students, and regional vulnerability, while simultaneously fostering pentahelix funding synergies beyond the state's fiscal sphere. This policy is expected to deconstruct inequalities, restore fiscal justice, and accelerate the dignified well-being of the community.

Keywords: *Economic Self-Reliance, Pesantren Education, Distributive Justice, Budget Policy, Dayah Needs Index.*

ABSTRAK

Upaya mewujudkan kemandirian ekonomi pesantren (dayah) di Aceh menghadapi stagnasi, ditandai dengan capaian produktivitas lembaga yang tertahan pada angka 5,85% dari target 9,4% pada tahun 2025. Kajian ini menginvestigasi disonansi struktural antara perencanaan teknokratis dan eksekusi penganggaran daerah. Melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, analisis USG, diagram Fishbone, dan matriks TOWS, ditemukan bahwa akar masalah bersumber dari distorsi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) akibat praktik pork barrel politics. Intervensi politik ini mengabaikan basis data 1.827 dayah terakreditasi, sehingga menciptakan ketidakadilan distributif yang meminggirkan dayah tradisional di wilayah rentan bencana. Di sisi hilir, inersia

dayah dalam digitalisasi pelaporan Education Management Information System (EMIS) turut menghalangi akses pembiayaan eksternal. Evaluasi kebijakan menggunakan metode William Dunn merekomendasikan pelembagaan "Indeks Kebutuhan Dayah" sebagai instrumen Mandatory Budgeting Policy dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Rekayasa teknokratis ini dirancang untuk mengunci distribusi anggaran secara proporsional berbasis data mutu akreditasi, jumlah santri, dan kerentanan wilayah, sekaligus mendorong sinergi pembiayaan pentahelix di luar ruang fiskal negara. Kebijakan ini diharapkan mampu mendekonstruksi ketimpangan, merestorasi keadilan fiskal, dan mengakselerasi kesejahteraan umat secara bermartabat.

Kata Kunci: *Kemandirian Ekonomi, Pendidikan Pesantren, Keadilan Distributif, Kebijakan Anggaran, Indeks Kebutuhan Dayah.*

PENDAHULUAN

Pesantren atau dayah di Provinsi Aceh memegang peranan sentral sebagai katalisator pembangunan ekonomi lokal. Ekosistem pesantren modern dituntut mencapai kemandirian finansial guna merespons dinamika sosial-ekonomi global secara adaptif tanpa bergantung penuh pada iuran santri atau donatur.

Transformasi dayah menjadi inkubator wirausaha berpotensi memberikan efek pengganda bagi akselerasi kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan realitas tingkat kemiskinan Aceh yang berada pada angka 14,45% dan Tingkat Pengangguran Terbuka yang mencapai 6,03% per Maret 2023.

Pendekatan Pengembangan Ekonomi Kelembagaan (Institutional Economic Development) menegaskan bahwa kemandirian finansial suatu entitas pendidikan tercapai apabila institusi tersebut mampu melepaskan diri dari belenggu ketergantungan karitatif dan bertransisi menuju pengelolaan unit usaha riil yang terstandarisasi dan layak bank.

Penyediaan ruang fiskal oleh pemerintah daerah belum menunjukkan hasil yang proporsional dengan target teknokratis. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2025 mencatat serapan anggaran afirmasi untuk pember dayaan dan pendidikan santri mencapai Rp3,46 Miliar, didampingi Rp2,18 Miliar untuk pembinaan manajemen dayah. Walau pun intervensi dana makro tersedia, realisasi indikator dayah yang produktif secara ekono mi mengalami stagnasi pada angka 5,85% dari target Rencana Pembangunan Aceh sebesar 9,4%. Kinerja yang berkategori cukup (62,23%) ini membuktikan presensi kegagalan sistemik dalam tata kelola distribusi pembiayaan pada level eksekusi.

Isu besarnya adalah kegagalan tata kelola tersebut ber sumber pada disonan si struktural antara perencanaan tekno kratis yang berbasis

data kelembagaan dan eksekusi penganggaran yang asimetris.

Teori Kebijakan Distributif dari Theodore Lowi mensyaratkan alokasi sumber daya publik harus berlandaskan parameter objektif kebutuhan kewilayahan guna mencegah patronase politik. Realitas eksekusi APBA justru terdistorsi oleh dominasi politik anggaran (pork barrel politics), terbukti dari 64,5% pagu prasarana dayah proyeksi tahun 2026 yang sepenuh nya dikendalikan oleh usulan reses legis latif. Intervensi politik ini memicu ketidak adilan distributif akut yang meminggirkan institusi di wilayah rentan bencana. Kabu paten Aceh Timur yang memiliki basis da yah tradisional masif hanya menerima alokasi Rp6,85 Miliar (2,7%), berbanding terbalik dengan wilayah berafiliasi politik elitis seperti Aceh Tenggara dan Bireuen yang menyerap hingga Rp73,3 Miliar.

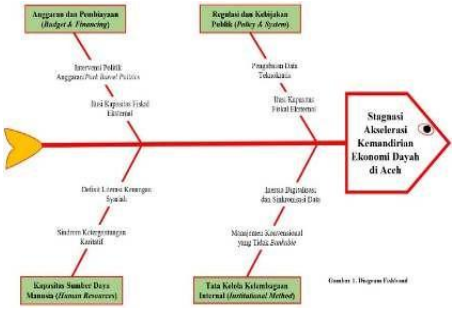
Penapisan permasalahan melalui ins trumen analisis tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan laju masalah (USG) mengonfirmasi keberadaan kondisi kritis yang membutuhkan intervensi radikal. Tingkat urgensi permasalahan didorong oleh fakta penyusutan kapasitas fiskal negara secara nasional, di mana Kemen terian Agama hanya memiliki ruang fiskal untuk memfasilitasi program inkubasi bisnis bagi 5.100 dari total 42.000 pesantren di Indonesia. Keseriusan masalah divalidasi oleh pengabaian instrumen pemetaan objek tif berupa 1.827 pangkalan data dayah terakreditasi Badan Akreditasi Dayah Aceh (BADA) sesuai Keputusan Gubernur No mor 400.8/1288/2025 dalam penentuan alokasi APBA. Penundaan reformasi tata kelola pembiayaan akan mengeskalasi kesenjangan sosial-ekonomi yang semakin tajam antara dayah modern yang mandiri dan dayah salafiyah yang termarjinalisasi.

No	Identifikasi Masalah	Urgency (U)	Seriousness (S)	Growth (G)	Total Skor	Peringkat
1	Distorsi Alokasi Fiskal Akibat Bias Intervensi Politik dan Pengabaian Data Teknokratis	5	5	5	15	I
2	Kesenjangan Kinerja Produktivitas Ekonomi (*Performance Gap*) pada Institusi Dayah	4	5	5	14	II
3	Inersia Tata Kelola Internal dan Lemahnya Sinkronisasi Data Digital Kelembagaan	4	4	5	13	III
4	Ketergantunga n Pembiayaan Eksternal di Tengah Keterbatasan Kapasitas Fiskal Negara	3	4	4	11	IV

Sumber: Olahan Data Primer, 2026.

Penelusuran akar kausalitas melalui pendekatan anatomi diagram tulang ikan (Fishbone) menyingkap bahwa kelemahan struktural birokrasi diperparah oleh inersia tata kelola internal dari dalam tubuh institusi pesantren. Kelemahan internal kelembagaan direpresentasikan oleh defisit literasi keu angan syariah dan resistensi pengelola dayah dalam mengintegrasikan pembaruan data secara digital ke dalam Education Management Information System (EMIS). Sistem pelaporan sirkulasi keuangan yang tidak transparan menutup legitimasi dayah untuk menjangkau sumber pembiayaan alternatif. Padahal, ekosistem ekonomi kola boratif di luar jalur fiskal pemerintah sangat terbuka luas,

ditandai dengan afirmasi mo dal produktif Baitul Mal, program ketahanan pangan BSI Maslahat, serta pen dampingan wirausaha Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (HEBITREN) binaan Bank Indonesia. Kelemahan administrasi internal inilah yang dimanfaatkan oleh regulasi dae rah yang longgar untuk memuluskan pem bajakan alokasi anggaran oleh aktor politik.



Sintesis evaluasi faktor internal dan eksternal melalui pembobotan matriks SWOT menempatkan posisi strategis pem biayaan pesantren di Provinsi Aceh pada kuadran agresif dan ekspansif. Kekuatan fundamental berupa legalitas pangkalan data 1.827 dayah terakreditasi merupakan modal teknokratis yang mutlak digunakan untuk mengeksploitasi peluang pembiayaan dari sektor perbankan syariah. Tinjauan literatur terdahulu memperlihatkan ruang kosong aka demis (gap) mengenai evaluasi makro kebi jakan politik anggaran ini.

Masmuroh dkk. (2023) membatasi kajian pada efektivitas instrumen keuangan mikro perbankan tanpa membedah struktur distorsi pembiayaan hulu dari pemerintah daerah. Zailani (2021) secara terpisah mengeksplorasi kemandirian institusi melalui kewirausahaan internal tanpa menganalisis dampak destruktif alo kasi APBD asimetris. Kesenjangan literatur ini menegaskan urgensi perumusan inovasi kebijakan yang mampu mengharmonisasi kan akurasi data teknokratis dengan koreksi arsitektur perancangan anggaran.

Berdasarkan konstelasi disfungsi manajerial dan struktural yang telah dieksplorasi, rumusan masalah sentral dalam penelitian ini difokuskan pada eva luasi tingkat disonansi antara dokumen perencanaan teknokratis berbasis mutu kelembagaan dengan mekanisme alokasi APBA yang terdistorsi oleh bias inter vensi politik. Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi tata kelola pembiayaan pesantren melalui formulasi kebijakan "Indeks Kebutuhan Dayah". Rekayasa tek nokratis ini dirancang sebagai instrumen pengikat dalam sistem informasi pemerin tahan untuk mengunci distribusi anggaran agar teralokasi secara proporsional sesuai tingkat kelayakan akreditasi, kuantitas santri, dan kerentanan wilayah, demi men jamin restorasi keadilan distributif pendi dikan di Provinsi Aceh.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian ini berpijak pada landasan Teori Kebijakan Publik melalui pendekatan Kebijakan Distributif yang dikonseptualisa sikan oleh Theodore Lowi. Kebijakan dis tributif yang berkeadilan mensyaratkan

alo kasi sumber daya publik didasarkan pada parameter kebutuhan teknokratis yang objek tif dan terukur. Konsepsi ini secara tegas menolak praktik patronase politik atau klien telisme dalam penyusunan instrumen angga ran. Dalam ruang lingkup ekosistem pendi dikan pesantren, keadilan distributif bermak na bahwa afirmasi anggaran daerah wajib dialokasikan secara proporsional sesuai de ngan skala kerentanan wilayah dan tingkat komitmen perbaikan tata kelola institusi. Pendekatan ini memastikan intervensi nega ra benar-benar menyentuh kelompok sasa ran yang paling membutuhkan fasilitasi pem bangunan ekonomi.

Perspektif Pengembangan Ekonomi Kelembagaan menggarisbawahi bahwa kemandirian finansial sebuah entitas pendidikan hanya dapat direalisasikan apabila institusi tersebut mampu bertransformasi dari pola manajerial kon vensional. Institusi dituntut untuk melepas kan diri dari sindrom ketergantungan terha dap bantuan karitatif. Transisi ini mewajib kan pengelolaan unit usaha riil yang memenuhi standar kelayakan perbankan serta terin tegrasi penuh dengan ekosistem digitalisasi pelaporan keuangan. Ghaziyya (2020) me nguatkan dalil ini dengan temuan bahwa pesantren modern di era kontemporer wajib mencapai kemandirian finansial agar keber lanjutan operasionalnya terbebas dari fluk tuasi iuran masyarakat. Maarif (2024) dan Siregar (2023) mendeskripsikan secara empiris bahwa penciptaan ekosistem eko nomi mandiri merupakan prasyarat adaptasi institusi dalam mengikis kantong kemis kinan wilayah secara organik.

Penelitian terdahulu telah memetakan dinamika ekonomi pesantren melalui berbagai sudut pandang manajerial. Masmuroh dkk. (2023) menelaah efektivitas instrumen keuangan mikro perbankan terhadap resiliensi usaha pesantren. Zailani (2021) berfokus pada eksplorasi model Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren sebagai pilar penguatan kewirausahaan internal. Keterbatasan ruang fiskal negara turut menjadi diskursus akademik yang disoroti tajam oleh Fatah (2022) dan Endi Suhendi Zen (2025). Publikasi tersebut mengonfirmasi bahwa anggaran negara melalui kementerian terkait hanya memiliki kapasitas penyaluran bantuan inkubasi bisnis bagi 5.100 lembaga dari total 42.000 pesantren berskala nasional. Realitas restriksi fiskal ini mendesak dayah untuk merancang strategi penciptaan pendapatan mandiri di luar instrumen anggaran negara.

Tinjauan terhadap literatur terdahulu mengidentifikasi adanya celah akademis pada aspek analisis kebijakan tata kelola politik anggaran daerah. Kajian sebelumnya luput membedah dampak destruktif dari alokasi anggaran asimetris yang didikte oleh kepentingan politik praktis. Wahyudi (2024) merumuskan urgensi pembentukan instrumen teknokratis

dalam formulasi kebijakan publik untuk membentengi dokumen perencanaan dari intervensi tak terukur pada anggaran daerah. Sintesis dari kajian Wahyudi ini melandasi gagasan penyusunan formulasi terstruktur yang mampu mengeliminasi praktik politik gentong babi dalam distribusi pembiayaan.

Secara yuridis dan institusional, Peme rintah Provinsi Aceh telah merespons kebu tuhan standardisasi teknokratis tersebut me lalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 ten tang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah. Regulasi turunan direalisasikan melalui Pera turan Gubernur Aceh Nomor 64 Tahun 2019 yang mengamanatkan pembentukan Badan Akreditasi Dayah Aceh. Puncak legalitas da ri instrumen ini bermuara pada Keputusan Gubernur Aceh Nomor 400.8/1288/2025 yang memvalidasi basis data resmi 1.827 da yah terakreditasi berdasarkan klasifikasi mu tu kelembagaan. Kesenjangan antara keter sediaan instrumen hukum teknokratis ini de ngan praktik pengabaian data pada level penganggaran menjadi pendorong utama (novelty) perumusan rekayasa kebijakan alo kasi yang berkeadilan dalam penelitian ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendeka tan kualitatif dengan desain studi kasus un tuk membedah fenomena disonansi struk tural antara dokumen perencanaan tekno kratis dan eksekusi alokasi Anggaran Penda patan dan Belanja Aceh (APBA) pada sektor pendidikan pesantren. Pengumpulan data diorkestrasikan melalui teknik triangulasi yang menggabungkan ekstraksi data sekun der dan penarikan data primer. Data sekun der bersumber dari dokumen fundamental pemerintahan yang meliputi Laporan Kiner ja Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2025, Laporan Realisasi Fisik dan Keua ngan APBA 2025, Keputusan Gubernur Aceh Nomor 400.8/1288/2025 terkait basis data akreditasi, serta agregat makroekonomi dari Badan Pusat Statistik. Data primer dita rik melalui penyebaran kuesioner kualitatif terbuka kepada 50 responden aktor strategis. Pemilihan sampel menerapkan teknik *purpo sive sampling* yang merepresentasikan pe mangku kepentingan utama, meliputi Perencana Bappeda Aceh, Majelis Akredi tasi Dayah Aceh, pejabat fungsional Kemen terian Agama, serta pimpinan Dayah Sala fiyah dan Terpadu. Instrumen ini difokuskan untuk mengonfirmasi validitas empiris ter kait bias intervensi politik anggaran serta memetakan tingkat inersia pengelola pesan tren terhadap kewajiban pelaporan data digital.

Prosedur analisis data dioperasikan melalui serangkaian tahapan sistematis. Da ta yang telah direduksi dibedah menggu nakan instrumen evaluasi matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan External Factor Evaluation (EFE) untuk memproyeksikan posisi strategis kelembagaan pada Matriks Kuadran

SWOT. Hasil kuantifikasi tersebut selanjutnya disilangkan melalui Matriks TOWS guna mengekstraksi perumusan stra tegi intervensi kebijakan. Penentuan keputu san akhir mengadopsi metode evaluasi kebi jakan publik William Dunn. Metode evalu asi ini mengkalibrasi alternatif kebijakan berdasarkan tujuh kriteria penilaian objektif, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadi lan distributif, responsivitas, ketepatan, dan ketersediaan sumber daya. Penggunaan me tode Dunn bertujuan memastikan rekomen dasi kebijakan tata kelola yang dihasilkan memiliki daya paksa regulatif dan menjamin restorasi pemerataan pembangunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Guna merumuskan "Indeks Kebutu han Dayah" sebagai instrumen korektif kebi jakan yang berkaliber artikel jurnal akade mik, identifikasi faktor-faktor strategis dilakukan melalui pemetaan lingkungan internal (rantai nilai kelembagaan) dan eksternal (lingkungan makro). Pemetaan ini akan menjadi material dasar dalam matriks SWOT.

A. Faktor Internal (Lingkungan Kelem bagaan Dayah dan Birokrasi Daerah)

1. Kekuatan (*Strengths* - S):

a) Terdapatnya *database* resmi dan legal dari 1.827 dayah yang telah terakreditasi BADA beserta tipologi mutunya (Tipe A Plus hingga Non Tipe).

b) Adanya komitmen penyerapan anggaran pemerintah daerah pada

c) program pemberdayaan santri yang telah berjalan (realisasi Rp3,46 Miliar pada 2025).

d) Pondasi regulasi lokal yang spesifik, yakni Qanun Penyelenggaraan Pendidikan Dayah yang melindungi eksistensi pesantren.

2. Kelemahan (*Weaknesses* - W):

a) Rendahnya kepatuhan pengelola da yah dalam mengintegrasikan pemba ruan data ke dalam sistem EMIS Kemenag.

b) Defisit literasi keuangan syariah di kalangan santri dan pengelola, sehingga unit usaha berjalan secara konvensional dan tidak *bankable*.

c) Mekanisme perencanaan APBA yang tidak memiliki *barrier* hukum untuk menolak usulan reses yang tidak sesuai dengan data BADA.

B. Faktor Eksternal (Lingkungan Makro dan Sektoral)

1. Peluang (*Opportunities* - O):

a) Kesiapan ekosistem perbankan sya riah dan institusi keuangan yang proaktif memberikan stimulus, se perti program ketahanan pangan BSI Maslahat, dan literasi SAKI NAH Bank Aceh.

b) Dukungan kelembagaan pemberda yaan ekonomi lintas sektoral mela lui pendampingan HEBITREN oleh Bank Indonesia.

c) Ketersediaan afirmasi modal pro duktif langsung dari Baitul Mal yang tidak mengikat secara politis

(contoh: alokasi Rp256 juta untuk 32 dayah di Aceh Selatan).

d) Momentum pengakuan nasional atas diraihnya 9 penghargaan Anu gerah Adinata Syariah 2026 oleh Provinsi Aceh, yang dapat menjadi katalisator percepatan kebijakan.

2. Ancaman (*Threats* - T):

a) Menyusutnya kapasitas ruang fis kal negara (APBN), di mana pro gram inkubasi bisnis Kemenag ba ru mampu mencakup sebagian kecil (5.100) dari total populasi pesan tren nasional.

b) Intervensi politik anggaran (*pork barrel politics*) yang persisten dari lembaga legislatif, mendistorsi keadilan distributif prasarana dayah.

Pemetaan dan Evaluasi Faktor Strategis Internal dan Eksternal

Diagnosis lingkungan strategis tata kelola pembiayaan pesantren di Provinsi Aceh dianalisis melalui matriks *Internal Fac tor Evaluation* (IFE) dan *External Factor Evaluation* (EFE). Temuan pada instrumen IFE menunjukkan total skor 2,25 yang bera da di bawah ambang batas rata-rata 2,50. Angka ini mengonfirmasi bahwa ekosistem internal birokrasi dan kelembagaan pesan tren berada pada posisi struktural yang le mah. Kekuatan fundamental berupa 1.827 pangkalan data dayah terakreditasi tereduksi drastis oleh ketiadaan tameng teknokratis untuk menghalau intervensi politik angga ran. Kelemahan ini diperburuk oleh rendah nya kepatuhan institusi pesantren dalam mengintegrasikan pembaruan data digital pada sistem *Education Management Infor mation System* (EMIS). Kajian saintifik atas temuan ini sejalan dengan konsep Pengem bangan Ekonomi Kelembagaan, di mana inersia administratif menghalangi transfor masi entitas pendidikan menuju ekosistem usaha yang terstandarisasi.

Tabel. 1 Matriks Internal Factor Evaluation (IFE)

Faktor Strategis Internal	Bobot	Peringkat	Skor
Kekuatan (Strengths)			
1. Ketersediaan pangkalan data resmi 1.827 dayah terakreditasi dengan tipolo gi mutu rigid.	0,15	4	0,60
2. Komitmen penyerapan anggaran APBA pada program afirmasi santri terealisasi Rp3,46 Miliar.	0,10	3	0,30
3. Eksistensi pondasi regu lasi lokal Qanun Pendidi kan Dayah yang melindungi pesantren.	0,10	3	0,30
Kelemahan (Weaknesses)			
4. Mekanisme perencanaan daerah tidak memiliki batasan hukum teknokratis.	0,25	1	0,25
5. Inersia kepatuhan dayah dalam mengintegrasikan data digital ke sistem EMIS.	0,20	2	0,40
6. Defisit literasi keuangan syariah pengelola yang me nyebabkan tata kelola kon vensional.	0,20	2	0,40
Total Skor IFE	**1,00**		**2,25**

Sumber: Olahan Data Primer (2026).

Evaluasi pada matriks EFE mengha silkan total skor 2,60 yang mengindikasikan kemampuan sistem birokrasi merespons ling kungan makro pada tingkat moderat. Skor ini

ditopang oleh respons positif terhadap program afirmasi modal dari Baitul Mal dan perbankan syariah. Ancaman terbesar de ngan bobot 0,25 muncul dari distorsi alokasi fiskal akibat praktik politik gentong babi (*pork barrel politics*), yang menciptakan ketimpangan alokasi kewilayahan. Temuan ini melampaui hasil penelitian Masmuroh dkk. (2023) yang hanya berfokus pada efek tivitas keuangan mikro internal. Hasil eva luasi makro ini membuktikan bahwa inter vensi permodalan eksternal akan gagal ber dampak luas apabila distorsi anggaran di hulu pemerintahan tidak diselesai kan.

Tabel. 2 Matriks External Factor Evaluation (EFE)

Faktor Strategis Eksternal	Bobot	Peringkat	Skor
Peluang (Opportunities)			
1. Intervensi afirmasi modal produktif lang sung dari BaitulMal.	0,15	4	0,60
2. Kesiapan perbankan syariah menyalurkan stimulus sektor riil.	0,15	4	0,60
3. Dukungan kelembaga an pemberdayaan ekono mi melalui program HEBITREN.	0,15	3	0,45
4. Momentum pengaku an nasional berupa penghargaan Anugerah Adinata Syariah 2026.	0,10	3	0,30
Ancaman (Threats)			
5. Distorsi alokasi fiskal akibat intervensi politik anggaran pencipta ketimpangan.	0,25	1	0,25
6. Keterbatasan ruang fiskal APBN menjang kau populasi pesantren secara nasional.	0,20	2	0,40
Total Skor EFE	**1,00**		**2,60**

Sumber: Olahan Data Primer (2026).

Diagnosis Posisi Strategis Kelembagaan

Pemetaan titik koordinat strategis di formulasikan melalui kalkulasi selisih agre gat skor pada sumbu internal dan eksternal. Sumbu X didapatkan dari pengurangan total skor kekuatan 1,20 dengan kelemahan 1,05 sehingga menghasilkan nilai positif 0,15. Sumbu Y diturunkan dari selisih total skor peluang 1,95 dengan ancaman 0,65 yang menghasilkan nilai positif 1,30.



Gambar. 1 Visualisasi Matriks Kuadran SWOT

Koordinat (0.15, 1.30) menempatkan tata kelola pembiayaan pesantren secara tegas pada Kuadran I (Agresif dan Ekspansif).

Analisis saintifik dari posisi ini membuktikan bahwa ancaman penyusutan kapasitas APBN serta distorsi politik anggaran daerah dapat dianulir oleh masifnya peluang eksternal yang siap diinjeksi ke dalam ekosistem pesantren. Kesiapan lembaga keuangan penyalur afirmasi modal produktif merupakan instrumen yang kebal terhadap kompromi politik praktis.

Temuan kuadran agresif ini memberikan justifikasi baru dibandingkan penelitian Zailani (2021) yang memposisikan kemandirian pesantren pada tahap survival. Posisi agresif mewajibkan pemerintah daerah mengadopsi langkah progresif untuk mengeksekusi lompatan kebijakan alokasi kewilayahan yang berkeadilan.

Journal Education and Government Wiyata ISSN 2986-5131
Volume 4 Nomor 3, Agustus 2026 (760-773)
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov

Formulasi Strategi melalui Matriks TOWS

Konversi identifikasi faktor strategis menjadi racikan kebijakan yang mengikat dilakukan menggunakan persilangan Matriks TOWS. Kuadran TOWS merumuskan empat alternatif strategi yang terpusat pada pembentukan instrumen pengukur kebutuhan dayah guna mengharmonisasikan pangkalan data teknokratis dengan parameter distribusi APBA.

Tabel. 3 Matriks TOWS Dekonstruksi Tata Kelola Pembiayaan Pesantren

Faktor Strategis	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
Peluang (Opportu nities)	**STRATEGI SO (Maxi-Maxi)** **SO1:** Mengkapitalisa si data BADA untuk menyerap permodalan ekosistem HEBITREN dan BSI. **SO2:** Mengarusutama kan kebijakan Indeks Kebutuhan Dayah melalui momentum apresiasi nasional.	**STRATEGI WO (Mini-Maxi) WO1:** Mewajibkan inte grasi digital data EMIS sebagai pra syarat akses stimu lus modal perban kan. **WO2:** Menerapkan pro gram literasi keu angan sebagai kuri kulum wajib unit usaha pesan tren.
Ancaman (Threats)	**STRATEGI ST (Maxi-Mini)** ST1: Merekayasa Indeks Kebutuhan Dayah menjadi regulasi anggaran mandatori untuk mengunci distribusi berbasis data BADA.	**STRATEGI WT (Mini-Mini)** WT1: Melakukan de-eskalasi ketergantungan dana hibah dengan memfasilitasi transformasi unit usaha berbadan hukum (Koperasi).

Sumber: Olahan Data Primer (2026).

Analisis TOWS di atas menunjukkan strategi pengungkit (SO dan ST) memegang peran paling dominan. Formulasi ini ditujukan untuk memecahkan stagnasi produktivitas ekonomi melalui pengesahan instrumen birokrasi baru yang mampu memblokir usulan anggaran tanpa landasan data akreditasi.

Komparasi dan Pemilihan Alternatif Kebijakan

Tiga alternatif kebijakan diekstraksi berdasarkan strategi TOWS. Opsi pertama berfokus pada transformasi kelembagaan internal melalui kewajiban digitalisasi EMIS dan peningkatan literasi keuangan. Opsi kedua menitikberatkan pada sinergi pembiayaan eksternal untuk mengurangi ketergantungan terhadap fiskal negara. Opsi ketiga mengusulkan pelembagaan Indeks Kebutuhan Dayah sebagai kebijakan mandatori dalam arsitektur APBA. Evaluasi dilakukan menggunakan kriteria William Dunn untuk menjamin objektivitas akademis dan realisme fiskal.

Tabel. 4 Matriks Penilaian Opsi Kebijakan Berdasarkan Kriteria William Dunn

Kriteria Evaluasi Dunn	Opsi I: Transformasi Kelembagaan Internal	Opsi II: Sinergi Pentahe lix Non APBA	Opsi III: Pelembagaan Indeks Kebutuhan Dayah
1. Efektivitas	2	3	5
2. Efisiensi	3	4	5
3. Kecukupan	2	3	5
4. Keadilan	2	3	5
5. Responsivitas	3	4	5
6. Ketepatan	4	4	5
Total Skor	**18**	**21**	**30**

Sumber: Olahan Data Primer (2026).

Hasil evaluasi kuantitatif menetapkan Opsi III sebagai intervensi kebijakan terbaik dengan total skor 30. Opsi ini mendemon strasikan superioritas absolut pada kriteria keadilan dan kecukupan. Kajian saintifik atas keunggulan ini didasari oleh kapabilitas Opsi III dalam

menyediakan daya paksa hukum untuk memutus praktik politik gen tong babi secara sistemik. Regulasi tekno kratis memaksa sistem perencanaan meru juk pada ketetapan akreditasi wilayah dan menolak usulan fiktif secara otomatis. Temu an empiris ini membuktikan bahwa pela tihan literasi (Opsi I) dan injeksi modal eksternal (Opsi II) tidak akan mencapai rasio efektivitas maksimal apabila ketimpangan dasar infrastruktur pendidikan di daerah rentan bencana belum terselesaikan secara adil melalui regulasi daerah.

Rekomendasi Kebijakan dan Peta Jalan Implementasi

Kebijakan utama yang direkomendasi kan adalah penerbitan Peraturan Gubernur mengenai Indeks Kebutuhan Dayah sebagai instrumen penganggaran mandatori yang dikunci secara algoritmik di dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Ke bijakan ini menyatukan variabel tipe akre ditasi BADA, jumlah populasi santri, kepa tuhan pelaporan EMIS, dan skala keren tanan wilayah ke dalam satu matriks kelaya kan. Formulasi ini mengeliminasi intervensi alokasi yang berpusat pada afiliasi patronase politik.

Tabel. 5 Matriks Peta Jalan Implementasi Kebijakan (2026–2030)

Waktu	Fase Implementasi	Kegiatan Utama Konkret	Indikator Keberhasilan
Tahun 1	Legalisasi Regulasi dan Integra si Sistem	Pengesahan Peraturan Gubernur; Integrasi database 1.827 dayah ke dalam SIPD.	Tertolaknya usulan anggaran tidak terakreditasi secara otomatis oleh sistem SIPD.
Tahun 2	Transisi Distribusi Afir matif	Distribusi APBA mem prioritaskan wilayah marjinal; Evaluasi kepatuhan EMIS.	Terdistribusiny a pagu prasa rana secara merata; 100% penerima APBA terdaf tar aktif EMIS.
Tahun 3	Konsolida si pembia yaan Pentahelix	Penyerahan profil dayah hasil kurasi APBA kepada institusi permodalan sektor riil.	Minimal 30% dari 1.827 dayah menda patkan pembia yaan pemba ngunan unit usaha man diri.
Tahun 4	Ekspansi Kapasitas Manajerial	Implementasi kurikulum wajib litera si keuangan; Re-Akredi tasi mutu manajerial.	Berkurangnya entitas dayah Non Tipe; Seluruh unit usaha memi liki laporan berstandar.
Tahun 5	Optimalisasi Keman dirian Kaffah	Pengukuran akhir ketahanan ekonomi; Deklarasi kemandirian berbasis klaster usaha.	Persentase dayah produk tif melampaui target awal 9,4% dengan capaian berkeadilan.

Sumber: Olahan Data Primer (2026).

KESIMPULAN

Stagnasi pencapaian target kemandirian ekonomi pesantren di Provinsi Aceh yang tertahan pada level 5,85% merupakan manifestasi dari patologi birokrasi dan disonansi struktural dalam tata kelola penganggaran daerah. Akar persoalan tidak terletak pada defisit kapasitas fiskal, melainkan pada pembajakan ruang perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) oleh praktik intervensi politik (*pork barrel politics*). Dominasi usulan politik yang mencapai 64,5% dari total pagu prasarana secara langsung mendelegitimasi instrumen teknokratis berupa pangkalan data 1.827 dayah terakreditasi dari Badan Akreditasi Dayah Aceh. Kondisi ini melahirkan ketidakadilan distributif ekstrem yang meminggirkan institusi pendidikan tradisional di wilayah rentan bencana, sekaligus mengeksploitasi inersia administratif pengelola pesantren yang

resisten terhadap sistem pelaporan digital (*Education Management Information System*).

Evaluasi strategis membuktikan bahwa kelemahan struktural birokrasi ini menahan laju pesantren untuk merengkuh peluang pembiayaan eksternal yang tersedia luas melalui ekosistem perbankan syariah dan lembaga filantropi daerah. Pendekatan karitatif maupun peningkatan literasi sumber daya manusia semata terbukti tidak memadai untuk memecahkan kebuntuan sistemik tersebut tanpa adanya perombakan dari hulu regulasi. Pemulihan keadilan fiskal membutuhkan rekayasa kebijakan yang bersifat memaksa dan mengikat secara hukum bagi perancang anggaran.

Penyelesaian komprehensif atas patologi ini bermuara pada pelembagaan "Indeks Kebutuhan Dayah" sebagai instrumen penganggaran mandatori (*Mandatory Budgeting Policy*) di dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Integrasi algoritma kebijakan yang menggabungkan variabel mutu akreditasi,kuantitas santri, kerentanan wilayah, dan kepatuhan pelaporan digital ini berfungsi sebagai penghalang teknokratis yang secara otomatis menolak usulan alokasi fiktif atau asimetris. Restorasi keadilan distributif melalui arsitektur perancangan anggaran yang objektif merupakan fondasi mutlak. Pijakan ini menjadi syarat esensial sebelum pesantren dapat diintegrasikan secara penuh dengan skema pembiayaan kolaboratif model pentahelix guna mewujudkan resiliensi ekonomi kelembagaan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2024). *Perkembangan indikator sosial ekonomi Provinsi Aceh 2024* (Vol. 12). Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh.

Dinas Pendidikan Dayah Aceh. (2023). *Dokumen indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Dayah Tahun 2023-2026*. Pemerintah Provinsi Aceh.

Dinas Pendidikan Dayah Aceh. (2025). *Laporan kinerja (LKj) Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2025*. Pemerintah Provinsi Aceh.

Dinas Pendidikan Dayah Aceh. (2025). *Laporan realisasi fisik dan keuangan APBA Dinas Pendidikan Dayah Aceh tahun anggaran 2025*. Pemerintah Provinsi Aceh.

Pemerintah Provinsi Aceh. (2018). *Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidi kan Dayah*. Lembaran Daerah Provinsi Aceh.

Pemerintah Provinsi Aceh. (2019). *Peraturan Gubernur Aceh Nomor 64 Tahun 2019 tentang Badan Akreditasi Dayah Aceh (BADA)*. Berita Daerah Provinsi Aceh.

Pemerintah Provinsi Aceh. (2025).

Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 400.8/1288/2025 tentang Penetapan Database Tipe Dayah Aceh Tahun 2025. Pemerintah Provinsi Aceh.

Fatah, A. (2022). Kemandirian ekonomi pesantren di era disrupsi: Strategi dan tantangan pembiayaan pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, *10*(1), 45–62. https://doi.org/10.15642/jpai.2022.10.1.45-62

Ghaziyya, F. (2020). Model pengembangan inkubator bisnis pesantren: Pendekatan institutional economic development. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, *13*(2), 211–230.

Hasan, M. (2023). Kegagalan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah: Studi kasus politik anggaran di tingkat provinsi. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, *7*(2), 115–132.

Maarif, S. (2024). Transformasi digital dan tata kelola EMIS dalam meningkatkan akuntabilitas pesantren. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *12*(1), 78–95.

Masmuroh, M., & Anwar, S. (2023). Efektivitas pembiayaan mikro syariah terhadap resiliensi usaha pesantren: Bukti dari program inkubasi bisnis. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, *15*(1), 89–106.

Siregar, A. P. (2023). Revitalisasi peran pesantren sebagai pusat entrepreneurship komunal untuk pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, *10*(4), 305–318.

Suryani, I., Rahman, A., & Hakim, L. (2025). Reformasi tata kelola keuangan pesantren: Urgensi adopsi standar akuntansi untuk inklusi perbankan syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, *13*(1), 12–28.

Wahyudi, A. (2024). Konstruksi instrumen teknokratis dalam formulasi kebijakan publik: Mencegah pork barrel politics pada APBD. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, *10*(2), 145–160.

Zailani, M. (2021). Kewirausahaan pesantren dan kemandirian institusi: Model HEBITREN dalam ekosistem ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, *8*(3), 201–215.

Alfandi, R. (2025, 17 November). 1.827 Dayah terakreditasi resmi masuk dalam database Pemerintah Aceh tahun 2025. *Serambi Indonesia*.

Bakar, H. A. (2026, 10 Juli). Bukan

sekadar penyaluran dana, bantuan modal dayah harus lahirkan kemandirian umat. *NU Online*.[cite: 5, 13]

Info Aceh Timur. (2026). *Anggaran prasarana dayah Aceh 2026 senilai Rp251,66 miliar juga menyeret Aceh Timur*. Info Aceh Timur Official.

Maulida, R. (2026, 9 Juni). Kemenag Simeulue dan Kanwil Aceh dorong kemandirian ekonomi pesantren melalui sosialisasi dan visitasi inkubasi bisnis. *Kementerian Agama Provinsi Aceh*.[cite: 9, 17]

PDRS Media. (2026, 3 Maret). Bank Aceh gelar SAKINAH di Pesantren Darur Rasyid, tingkatkan literasi keuangan syariah santri. *Pondok Modern Darur Rasyid*.[cite: 8, 16]

Ruhul Islam Anak Bangsa. (2026). BSI Maslahat dukung kemandirian ekonomi pesantren di Aceh, RIAB sukses lakukan panen perdana ikan lele. *Website Resmi RIAB*.[cite: 6, 14]

Safrina. (2025, 15 Januari). BI Aceh dorong pengembangan wirausaha pesantren melalui HEBITREN. *InfoPublik*.[cite: 7, 15]

Sandy. (2026, 7 Juli). Sabet 9 penghargaan, Aceh raih prestasi gemilang di Anugerah Adinata Syariah 2026. *Waspada Online*.[cite: 10]

Yunus, M. (2025, 30 Juni). Kemenag perkuat komitmen untuk pesantren. *Kementerian Agama RI*.[cite: 11]